

MISTERI SUPERSEMAR

Dilengkapi Wawancara Ali Ebram
Si Pengetik SUPERSEMAR

Eros Djarot, dkk



Ebook pratinjau terbatas yang sedang Anda baca ini berasal dari:



<http://www.pustaka78.com>

**Sumber Download Ebook Pratinjau Terbatas Google Books
Khusus Buku-buku Berbahasa Indonesia atau Buku-buku
Berbahasa Asing Tentang Indonesia**

Online Sejak 1 Januari 2009

website: <http://www.pustaka78.com>

email: pustaka78@gmail.com

fan facebook: <http://facebook.pustaka78.com>

Lisensi Dokumen:

**@ Hak Cipta ada pada Penulis/Pengarang, Penerbit
atau Sumber Online.**

Buku pratinjau terbatas ini pertama kali dipublikasikan untuk publik oleh **Google Books** atas persetujuan penerbit yang bersangkutan. Dikompilasi dalam bentuk file ebook berformat PDF oleh **Pustaka Ebook Gratis 78 (PG78)** untuk memudahkan para pembeli atau pustakawan dalam hal membaca sebelum memutuskan untuk membelinya. Seluruh material yang terkandung dalam ebook ini dilindungi undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen negara **UU RI No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta**. Ebook pratinjau terbatas ini boleh disebarluaskan tanpa menghilangkan identitas pemilik hak cipta. Hak cipta ada pada penerbit atau penulis. **PG78** semata-mata hanya sebagai penyedia informasi buku-buku khusus berbahasa Indonesia atau buku-buku berbahasa asing tentang Indonesia yang memiliki koleksi buku pratinjau terbatas dalam database publikasi online gratis dari **Google Books**. Buku digital pratinjau terbatas ini tidak akan pernah menggantikan buku versi cetaknya yang lebih lengkap, malah mendukung promosinya. Semoga semua bahan bacaan koleksi **PG78** ini bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga dunia perbukuan nasional dapat maju dan berkembang dengan pesat.

MISTERI SUPERSEMAR

Penulis: **Eros Djarot, dkk**
Pendesain sampul: **boed**
Penata letak: **Irwan Rouf**
Diterbitkan pertama kali oleh: **Mediakita**

Redaksi:

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 100 A-B Lt. 2
Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12420
Telp. (021) 7290899, 7707129, 7701295
Faks. (021) 7290899, 7701295
E-mail: info@mediakita.com
Situs web: www.mediakita.com

Distributor tunggal:

PT AgroMedia Pustaka
Jl. Rajawali IV Blok HD-X No. 3 Tangerang 15226
Telp. (021) 7451644, 74863334
Faks. (021) 74863332
E-mail: agromarketing@cbn.net.id
Situs web: www.agromedia.net

Cetakan pertama Juli 2006

Hak cipta dilindungi undang-undang

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Djarot, Eros

Misteri Supersemar/Eros Djarot, dkk; Cet. 1; Jakarta, Mediakita, 2006
viii + 110 hlm.; 23 cm
ISBN 979-794-011-x
1.Politik I. Judul

Kekalahan Intelektual, Kematian Akal Sehat

[Eros Djarot]

Dokumen negara yang sangat penting itu ternyata menghilang, dan sampai hari ini masih tetap dinyatakan “hilang”. Semua bungkam, termasuk para pelaku utama yang sekarang ini masih hidup. Peristiwa sejarah menyangkut keaslian ‘Surat Perintah 11 Maret’ pun menjelma menjadi sebuah “ruang gelap” yang sampai saat ini tetap dipertahankan sebagai misteri politik tingkat tinggi. Dan, di “ruang gelap” itulah seluruh warga bangsa dibiarkan buta sambil terus menerka-nerka dengan berbagai teori konspirasi (politik) saat mencoba menelusuri apa yang sesungguhnya terjadi di balik Surat Perintah 11 Maret.

Misteri seputar SP 11 Maret ini menjadi kian angker ketika Jenderal M. Jusuf, yang dikenal sebagai seorang jenderal yang bersih dan jujur, tak sedikit pun mau membuka mulut. Padahal ia adalah salah satu pelaku sejarah yang turut membidani lahirnya SP 11 Maret. Yang menjadi pertanyaan, begitu tegakah jenderal yang dikenal sangat dekat dengan prajurit dan rakyatnya ini membiarkan rakyat Indonesia, terutama generasi penerus, hidup dalam kegamangan sejarah? Apalagi sekarang ketika rakyat menjadi sadar bahwa berawal dari lahirnya SP 11 Maret inilah bangunan kekuasaan rezim Orde Baru yang telah memorakporandakan bangsa ini dibesarkan hingga tumbuh sebagai gurita ganas yang menakutkan.

Soal fakta sejarah bahwa SP 11 Maret benar ada, rasanya, tak seorang pun menyangkalnya. Tapi bahwa di balik fakta tersebut tersimpan peristiwa sejarah (politik) yang masih perlu dikaji kebenarannya, rasanya tak seorang pun pula yang sanggup menyangkal. Semua

orang yang terdidik pasti memahami bahwa kebenaran sejarah dalam kaitan penulisan sejarah- sangat ditentukan oleh sejarah peradaban, khususnya kekuasaan; ia selalu berjalan di antara pembenaran yang satu ke pembenaran yang lain. Pada saat inilah kebenaran sejarah patut dipertanyakan.

Seorang pakar sejarah dan seorang kawan pangamat politik sempat bercuriga ketika saya mencoba mengangkat masalah seputar sejarah lahirnya SP 11 Maret. Dengan membubuhkan stempel sebagai orangnya Soekarno di atas kening saya, dengan candanya yang sinis ia menyindir, "Sudahlah, Bung. Bung Karno juga banyak salahnya..., seperti juga Pak Harto!" Yang lain pun menimpali. "Takut amat sih kalau Megawati enggak jadi presiden...."

Masya Allah..., lho kok begitu reaksinya? Kalau begini, ya... mau apa lagi? Ternyata dalam dunia intelektual kita, masih terlalu banyak manusia yang belum dapat memerdekakan dirinya dari pola pikir masa lalu yang mengotak-ngotakkan manusia dengan begitu sederhana, berbekal teori konspirasi yang dikembangkan berdasarkan panduan rasa senang tak senang (*like and dislike*) dan sangat personal.

Melalui peristiwa yang "kecil" ini, semakin saya pahami mengapa bangsa kita sampai begitu terpuruk hingga berada dalam titik kehidupan yang sangat menyedihkan. Kesimpulan saya pun menjadi kian bulat: bahwa kekalahan yang diderita bangsa kita hari ini merupakan puncak dari kekalahan akal sehat. Dengan kata lain, kesemrawutan dan keterpurukan kita sebagai bangsa sekarang ini merupakan cermin dari kekalahan intelektual yang paling nyata.

Bahwasanya Soeharto bersalah dan paling bertanggung jawab dalam kaitan sebagai penanggung jawab penyelenggara negara sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru, memang benar. Tapi fakta ini tak akan mengurangi tudingan saya terhadap kaum intelektual yang dimiliki negeri ini bahwa semua ini hanya dimungkinkan terjadi karena para intelektual telah berkhianat pada peran dan dirinya sendiri. Atau, bila tudingan ini dianggap kurang tepat, saya pun tak keberatan untuk mengubah pertanyaan menjadi seperti berikut: bukankah kematian dunia intelektual di suatu negeri selalu melahirkan peristiwa kehidupan (kebudayaan) yang seperti terjadi pada bangsa kita sekarang ini?

Pengkhianatan intelektual selalu berdampak pada matinya kejujuran dan keterbukaan. Itulah yang sebenarnya terjadi di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan semasa rezim Orde Baru berkuasa. Kalau toh saat ini ada satu-dua dari kaum intelektual yang tetap setia pada peran sejarahnya, sangat disayangkan mereka justru dikucilkan oleh peradaban politik-ekonomi (hedonis) yang begitu dominan mewarnai kehidupan saat itu. Akibatnya, dunia intelektual dan masyarakatnya hanya berperan sebagai legitimator dari berbagai kehendak penguasa (*power obedience*).

Terbukti dengan terkerangkengnya para intelektual kita ke dalam wadah-wadah formal yang terstruktur dan menjadi bagian dari pengabdian kekuasaan.

Keadaan seperti gambaran di atas inilah yang membuat bangsa kita sampai hari ini dihadapkan pada kesulitan untuk mengenali dirinya sendiri. Karena selama berpuluh tahun kita telah dijadikan sebagai bukan diri kita sendiri; terputus dari kesejarahannya dan menjadi manusia yang “dijadikan” tanpa berkemampuan untuk “menjadikan”. Sepenuhnya kehilangan daya gerak karena selalu digerakkan. Akhirnya, seluruh akal sehat rela dikubur dalam satu kubangan besar dengan sebuah batu nisan besar yang bertuliskan: “Demi Pembangunan”.

Itulah sebabnya ketika upaya dimunculkan ke permukaan untuk mencari berbagai mata rantai sejarah yang hilang, hambatan utamanya adalah tembok tebal yang bertuliskan: di negeri ini, kebenaran tak diperlukan. Yang terpenting adalah pembenaran. Terutama pembenaran terhadap hal-hal yang tidak benar. Karena kebenaran adalah ancaman. Dan ancaman harus ditiadakan!

Membaca tulisan tersebut, saya pun bertanya itukah sebabnya mengapa SP 11 Maret tetap dibiarkan berdiri sebagai *the untouchable history*? Wallahualam!

Menggugat Dongeng Supersemar versi Orde Baru

Sejarah kerap dimanipulasi untuk kepentingan penguasa.
Dan, Supersemar adalah salah satunya.

Jumat pagi, 11 Maret 1966, kota Jakarta terasa gerah. Ribuan mahasiswa turun ke jalan. Mereka bergerak ke Istana Merdeka untuk satu tujuan: membubarkan sidang kabinet 100 menteri yang dipimpin Presiden Soekarno. Sementara itu, di Lapangan Monas, pasukan tanpa identitas bergerak ke tempat yang sama. Acara sidang kabinet pun dipersingkat dan Soekarno mengungsi ke istana Bogor. Sejarah akhirnya mencatat, itulah sidang kabinet terakhir yang dipimpin oleh Bung Karno.

Sampai sebatas itu, kebenaran ceritanya tak banyak yang menyangsikan. Namun, banyak orang kemudian bertanya-tanya: apa yang sesungguhnya terjadi setelah Soekarno berada di Bogor dan kemudian meneken surat perintah 11 Maret (SP 11 Maret/ Supersemar)? Kenapa pula Soeharto yang menerima perintah itu tidak melapor kepada si pemberi perintah?

Melihat alur pembukanya saja, jelas lahirnya SP 11 Maret bukanlah peristiwa yang *ujug-ujug* (tiba-tiba) atau sebuah mukjizat, seperti yang diutarakan oleh mantan mendagri, Amirmachmud, melainkan merupakan bagian dari suatu skenario besar yang telah dirancang secara rapi.

Sayangnya, sulit ditemukan jawaban atas pertanyaan itu dalam literatur-literatur terbitan Orde Baru. Sebab, semua buku sejarah boleh

jadi telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah lahirnya Supersemar adalah suatu proses yang wajar-wajar saja, tanpa penyimpangan. Tidak adanya naskah asli SP 11 Maret bisa jadi juga merupakan bagian dari manipulasi tersebut. Upaya memperoleh jawaban pun kian sulit karena selama puluhan tahun, pelaku sejarah atau setidaknya saksi mata memilih bungkam, mungkin karena takut. Tak heran, sekian lama SP 11 Maret menjadi misteri.

PASUKAN “LIAR” KOSTRAD

Satu peristiwa yang mengawali rentetan peristiwa yang melahirkan SP 11 Maret adalah suasana saat berlangsung rapat kabinet 100 menteri. Adanya demo mahasiswa -sebagai kelanjutan aksi mahasiswa menyuarakan Tritura (bubarkan PKI, bubarkan kabinet 100 menteri, dan turunkan harga)- serta kehadiran pasukan tanpa tanda pengenal, telah mengubah suasana sidang kabinet yang baru berlangsung 10 menit itu menjadi mencekam. Kol Pol Sumirat, ajudan Bung Karno, yang ketika itu duduk persis di belakang “bosnya”, mendadak memperoleh nota dari Brigjen Sabur, komandan Cakrabirawa. “Berhubung adanya pasukan yang bergerak di sekitar istana, Bapak supaya cepat-cepat meninggalkan rapat,” begitu isi nota seperti yang dikatakan Sumirat kepada *DeTAK*. Bung Karno terhenyak membaca nota itu. Ia segera menyerahkan pimpinan sidang kepada Leimena (Waperdam), dan se-jurus kemudian Bung Karno terbang ke istana Bogor dengan heli.

Untuk sekian lama, tak terjelaskan siapa sebenarnya pasukan tanpa tanda pengenal alias pasukan liar, meskipun semua jari telah menuding bahwa itu pasukan Kostrad. Kepastian bahwa itu pasukan Kostrad disampaikan oleh Kemal Idris, yang ketika itu menjadi Kepala Staf Kostrad. “Saya disuruh Pak Harto. Lalu saya memerintahkan Sarwo Edhie untuk menggerakkan pasukannya ke Istana untuk menangkap Bandrio,” kata Kemal Idris. Menurutnya, pasukan sebanyak dua kompi (sekitar 80 personel) itu sengaja tak memakai tanda kesatuan supaya Soebandrio tidak takut keluar istana.

Pengerahan tentara liar itu, ternyata, berkait dengan rapat SUAD (Staf Umum Angkatan Darat), yang digelar beberapa hari menjelang

sidang kabinet 100 menteri. Jenderal Soemitro, dalam bukunya *Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib*, menuturkan, pada 4 Maret, Soeharto, yang waktu itu Menteri Panglima AD, minta izin Bung Karno untuk menangkap sejumlah menteri yang dinilai terlibat G-30-S/PKI. Tapi Bung Karno menolak. Karena penolakan itu, dalam rapat SUAD Soeharto memutuskan untuk memisahkan Bung Karno dari 'durno-durno'-nya, seperti Subandrio. "Perintah itu akan dilaksanakan pada saat sidang kabinet di Istana Merdeka, pada 11 Maret," kata Soemitro.

Memang terkesan naif karena hanya untuk menangkap Soebandrio dikerahkan dua kompi pasukan. Apalagi, seperti kesaksian seorang anggota DPC (Detasemen Pengaman Khusus) Cakrabirawa yang ketika itu ikut menjaga sidang kabinet, mereka bersenjata laras panjang. Tapi, terlepas dari apa sebenarnya yang akan dilakukan pasukan Kostrad tersebut, "serbuan" itu telah membuktikan dengan jelas pembangkangan Soeharto kepada Soekarno. Seperti diutarakan Soemitro, Soekarno tidak mengizinkan Soeharto menangkap Soebandrio. Dan pembangkangan ini, tentu saja, berkait dengan kehadiran tiga jenderal suruhan Soeharto untuk menemui Bung Karno ke istana Bogor.

'ANCAMAN' SOEHARTO

Sesuai dengan kesaksian sejumlah sumber *DeTAK* dan pengakuan Amirmachmud dalam buku *H. Amirmachmud Menjawab*, setelah sidang dibubarkan, Amirmachmud bertemu dengan Brigjen Basuki Rachmad, Menteri Veteran, dan Brigjen M Jusuf, Menteri Perindustrian, di tangga sebelah kanan Istana Negara bagian barat. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk datang ke rumah Soeharto di Jl Agus Salim 98, sebelum akhirnya pergi ke Istana Bogor.

Nah, ketika bertemu Soeharto itulah, mereka dititipi surat untuk disampaikan kepada Bung Karno. Menurut Kemal Idris, yang sebelum kedatangan ketiga jenderal itu telah terlebih dulu menghadap Soeharto, inti surat itu adalah Soeharto tidak akan bertanggung jawab terhadap keamanan apabila tidak diberi perintah tertulis dari Soekarno.

Pernyataan Kemal Idris ini setidaknya sesuai dengan pengakuan M. Jusuf yang dimuat di harian *Suara Karya*, edisi Maret 1973. Di situ Jusuf menulis, "...Pak Harto bersedia memikul tanggung jawab apabila kewenangan diberikan kepada beliau, untuk melaksanakan stabilitas keamanan dan politik berdasarkan Tritura."

Yang pantas juga dipertanyakan, kenapa saat itu Soeharto selaku Menpang AD tidak menghadiri sidang kabinet? Dalam sejumlah literatur, tertulis saat itu dia tengah sakit flu dan tenggorokan. Namun, kepada *DeTAK*, Kemal meyakinkan bahwa Soeharto hari itu sehat walafiat. "Saya lihat sendiri, dia itu sehat walafiat," katanya.

Dahlan Ranuwiharjo, mantan anggota MPRS, bahkan yakin, sakitnya Soeharto ketika itu adalah sakit politis. "Saya tahu betul, Soeharto itu tidak berani berhadapan langsung dengan Soekarno. Sebab, kalau berhadapan langsung, Soeharto akan menjadi lemah," katanya.

Begitulah, tiga orang jenderal tadi akhirnya pergi ke istana Bogor untuk menemui Bung Karno. Menurut M. Jusuf, mereka sampai di istana Bogor setelah para ajudan dan pengawai Bung Karno datang. Dan mereka terpaksa harus menunggu karena saat itu Bung Karno sedang tidur. "Barulah sekitar pukul 14.30 kami bertiga dipanggil," tulis Jusuf. Ketiganya diterima Bung Karno di paviliun tempat Ny Hartini, istri kedua Bung Karno, tinggal. Nah, di sinilah kontroversi terhadap proses pembuatan naskah SP 11 Maret terjadi.

Soekarjo Wilarjito, yang mengaku bekas *security* Istana Bogor berpangkat letda, bulan Agustus 1998 menyatakan adanya penodongan yang dilakukan Wakil Panglima Angkatan Darat, Brigjen TNI Maraden Panggabean, terhadap Bung Karno. Tapi, kesaksian Wilarjito itu dibantah oleh sejumlah eks pasukan resimen Cakrabirawa. "Itu tidak benar. Nama Wilarjito saja kami enggak kenal," ucap Zaenuri Kadri, mantan anggota DKP (Detasemen Kawal Pribadi) Cakrabirawa, kepada *DeTAK*.

Toh, itu bukan berarti 'penodongan' dalam versi yang lain tidak ada.

Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, staf asisten I Cakrabirawa yang saat itu mendampingi Bung Karno, menyatakan adanya penekanan terhadap Soekarno. Penekanan itu, seperti digambarkan Ali Ebram,

misalnya, pernyataan Amirmachmud, “Sudah, Bapak bikin saja...” atau “Udah deh, Bapak itu masa tidak percaya dengan angkatan darat,” yang diucapkan Amirmachmud sambil berdiri (baca wawancara dengan Ali Ebram: *Melihat Amirmachmud, Saya Ingin Merogoh Pistol*).

M. Jusuf sendiri mengakui adanya ketegangan itu. Jusuf menulis, selama pembicaraan dengan Bung Karno itu -mulai 14.30 hingga 17.30- terjadilah dialog, yang terus terang cukup tegang. Tentunya cukup unik, bagaimana ketiga jenderal yang waktu itu dinilai cukup dekat dengan Bung Karno berani ‘beradu’ argumentasi dengan Bung Karno. Tentu hal ini tidak terlepas dari ‘pesan’ Soeharto. Apalagi, Jusuf sendiri mengaku bahwa apa yang diperbincangkan adalah masalah yang menentukan bagi peralihan dari suatu masa lama ke masa baru.

DIKETIK TIGA KALI

Pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terpecahkan adalah apa sebenarnya isi supersemar tersebut. Kesaksian Ali Ebram setidaknya bisa mengungkap misteri seputar hal itu. Menurutny, sekitar pukul 15.00, ia dipanggil Sabur dan diperintah untuk membawa mesin ketik, sekaligus mencari kertas berkop kepresidenan, untuk dibawa masuk ruang tengah paviliun Ny Hartini. Di situlah Ali Ebram mengetik setiap kalimat yang diucapkan Bung Karno. Setelah pengetikan selesai, dua lembar hasilnya dibawa Bung Karno ke hadapan ketiga jenderal, yang menunggu di ruang lain. “Setelah itu saya tidak mengurus lagi,” kata Ali.

Kesaksian Ali ini agaknya klop dengan cerita Ny Sri Hardani (istri Amirmachmud) di harian *Merdeka* 11 September 1998. Menurut penuturan suaminya, ketika menerima ketiga jenderal tadi, Bung Karno masuk kamar lagi dalam waktu yang cukup lama. Dengan penjelasan istri Amirmachmud itu, berarti memang sangat mungkin saat itu Bung Karno tengah mendiktekan naskah awal Supersemar. Pengakuan Soebandrio kepada *DeTAK* juga menguatkan adanya naskah pertama Supersemar tersebut. Soebandrio menyatakan

dipanggil Bung Karno untuk membaca dan meneliti naskah ketikan sebanyak dua lembar tersebut. “Bukan ngoreksi. Misalnya begini, ada yang kebanyakan huruf ‘s’, itu kita betulin. Hanya yang begituan saja yang kita betulin,” katanya.

Hasil koreksian yang masih dua lembar itu kemudian diberikan kepada Sabur untuk diketik kembali. Saksi mata yang melihat Sabur mengetik adalah Mangil. Dalam bukunya yang akan segera diterbitkan, Mangil, sekitar menjelang Maghrib, mengaku melihat Sabur datang ke paviliunnya dengan membawa kertas dan berkata bahwa dia memerlukan mesin ketik. Saat itu Sabur berucap, “Gua mau bikin surat perintah, nih.” (Baca: *Kesaksian Mangil*).

Setelah diketik, naskah itu dibawa kembali ke paviliun Ny Hartini. “Dari dialog kedua itulah tersusun *draft* Supersemar sebagaimana kita kenal sekarang,” tulis Jusuf. Namun, Amirmacmud sendiri mengakui bahwa setelah naskah dua lembar yang diketik Sabur itu diserahkan, Bung Karno masih ragu untuk menandatangani. “Bagaimana ya saya tanda tangani atau tidak?” ucap Bung Karno berkali-kali meski akhirnya, menurut Jusuf, pada pukul 20.55 membubuhkan tanda tangannya.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah naskah yang beredar saat ini sesuai dengan naskah yang diketik Sabur? Di sinilah manipulasi dilakukan. Hal itu bisa dilihat dari jumlah naskah yang sebelumnya dua lembar menjadi satu lembar. Dalam bukunya *Pengalaman dalam Masa Pengabdian Sebuah Otobiografi*, Soedharmono, yang waktu itu menjadi staf G 5 KOTI, menulis, “Kalau dikatakan surat asli dua lembar, memang dua lembar. Jadi, yang sekarang digabung jadi satu halaman tujuannya untuk efisiensi pencetakannya saja.”

Pernyataan Soedharmono ini terasa mengada-ada. Peringkasan suatu dokumen -yang begitu penting- bisa dipastikan mempunyai maksud-maksud tertentu daripada sekadar efisiensi. Yang jadi teka-teki, dari mana diperoleh tanda tangan Bung Karno di surat yang telah dipadatkan itu? Mungkinkah tanda tangan Bung Karno dipalsu atau ditempelkan begitu saja, kemudian digandakan?

Adanya manipulasi isi Supersemar agaknya memang tak terbantah lagi, setelah baik Kemal Idris maupun Soebandrio memberikan

kesaksian. Dalam bukunya *Kemal Idris Bertarung Dalam Revolusi*, Kemal mengungkapkan, “Pada pukul 23.00 malam, ketiga jenderal itu kembali ke Kostrad dengan membawa surat dari Bung Karno, yang isinya melimpahkan kekuasaan kepada Pak Harto. Saya sempat membaca surat itu, yang memberikan kekuasaan kepada Pak Harto untuk bertindak mengamankan situasi. Setelah tugas dilaksanakan, kekuasaan dikembalikan kepada Bung Karno sebagai presiden RI. Surat itu dikenal dengan nama Supersemar.”

Soebandrio, yang waktu itu ikut membaca bahkan ikut mengoreksi naskah Supersemar, membenarkan adanya poin yang antara lain menyebut “dikembalikan”. “Ya, ada, ada itu. Saya enggak tahu kenapa dihilangkan. Tapi yang pasti kata-kata itu memang ada,” katanya.

Dalam perkembangannya, ternyata bukan hanya terjadi penggelapan fakta sejarah. Yang lebih parah lagi, Soeharto, yang menerima perintah tersebut, ternyata telah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Pertama, kekuasaan yang diberikan kepada Bung Karno itu tak pernah dikembalikan lagi. Bahkan melapor pun tidak. Padahal klausul “untuk melaporkan” ini terdapat dalam naskah Supersemar. Kedua, Soeharto bahkan melangkahi wewenang Bung Karno dengan membubarkan PKI, meski saat itu PKI memang menjadi semacam *common enemy*. Ketiga, naskah yang merupakan eksekutif order itu disulap menjadi Tap MPRS untuk memuluskan jalan Soeharto ke kursi presiden.

Agaknya Soeharto telah dengan sadar “memanfaatkan” Supersemar tersebut. Ini terbukti dia menolak menghadap Soekarno setelah membubarkan PKI pada 12 Maret 1966. Menurut mantan Menpang AU Sri Mulyono Herlambang, pada 14 Maret, dia disuruh Bung Karno menemui Soeharto, untuk menanyakan kenapa tidak ada koordinasi dengan AU perihal pembubaran PKI. Tapi, kata Herlambang kepada *DeTAK*, saat itu Soeharto menjawab, “Itu atas tanggung jawab saya.” Kabarnya, Bung Karno juga mengutus Leimena, Waperdam, untuk menyampaikan surat yang intinya mengingatkan Soeharto bahwa SP 11 Maret itu sifatnya adalah teknis/administratif keamanan, dan bukan politik. Di situ juga diperintahkan agar Soeharto menghadap presiden di istana untuk memberikan laporan. Dan Soeharto tak pernah mau menghadap.

Bisa jadi Soeharto saat itu berpikiran *to be or not to be*: dihabisi atau menghabisi. Nah, ketika akhirnya Soeharto terbukti tampil sebagai pemenang, Supersemar pun menjadi remang-remang. Bisakah semua itu disebut *coup d'etat*?

Supersemar bukan Pelimpahan Kekuasaan

Wawancara dengan Soebandrio, mantan wakil perdana menteri (waperdam) I dan menteri luar negeri (1957-1966) Hari Rabu, 24 Februari 1999.

Dr Soebandrio (85) adalah salah seorang saksi hidup peristiwa keluarnya Supersemar. Ketika itu ia menjadi wakil perdana menteri I (waperdam I) dan menteri luar negeri (1957-1966). Beberapa hari setelah Supersemar dikeluarkan, ia dan beberapa menteri lainnya yang dicurigai terlibat dalam peristiwa G-30-S/PKI ditangkap. Ia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) tahun 1966. Hukuman itu kemudian diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Setelah istrinya meninggal dunia, tahun 1974, Soebandrio menikah lagi dengan Sri Kusdyantinah, janda Kalonel Bambang Supeno.

Setelah 30 tahun mendekam di balik terali besi, pada tahun 1996 Tokoh PNI ini dibebaskan, Saat ini dia tengah menulis otobiografinya, yang rencananya akan diterbitkan setelah Pemilu 1999.

Kini menutup diri terhadap wartawan. Menurut istrinya, Sri Kusdyantinah, sudah banyak wartawan yang ingin wawancara, tapi selalu ditolak. *DeTAK* beruntung berhasil mewawancarai Soebandrio di rumahnya. "Saya hanya mau diwawancarai *DeTAK*. Kalau wartawan lain saya tolak," ujar Soebandrio dengan suara serak. Berikut petikan wawancara *DeTAK* dengan pria bertubuh pendek yang senja itu bercelana pendek.

Apakah Anda berada di Istana Bagor saat pembuatan Supersemar tanggal 11 Maret 1966?

Ya.

Siapa saja yang berada di Istana Bogor saat itu?

Bung Karno, saya, Chaerul Saleh (Waperdam), Mayjen Basuki Rahmat (Menteri Veteran), Brigjen M. Jusuf (Menteri Perindustrian Ringan), dan Brigjen Amirmachmud (Pangdam V Jaya).

Itu di ruang utama?

Ya, ya.

Anda sempat berbicara dengan ketiga jenderal itu?

Ya. *Wong*, mereka itu teman, *Wong* kumpul, ya ngomong. Gimana sih, Anda? Mereka itu teman sendiri.

Bagaimana suasananya waktu itu?

Baik, baik.

Tapi, kabarnya suasananya waktu itu tegang?

Enggak. Ngapain tegang?

Benarkah ada yang menodong Bung Karno pakai pistol?

Enggak ada. Yang penting kita percaya ketiga jenderal itu teman kita sendiri. Oke, ya? Cukup, ya?

Kabarnya Supersemar itu dua halaman?

Ya, ya, memang dua halaman.

Tetapi, mengapa yang beredar secara resmi hanya satu halaman?

Enggak tahu saya. Setahu saya ada dua halaman. Saya enggak tahu kenapa kemudian menjadi satu halaman. Saya enggak tahu mengapa ya sampai begitu.

Konon, di halaman dua di alinea terakhir tertulis kalimat “setelah keadaan terkendali Supersemar diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno”. Apakah benar ada kata-kata seperti itu?

Ya, ya, ada, ada itu.

Tapi, mengapa dalam Supersemar yang resmi beredar kata-kata itu, tidak ada? Dihilangkan?

Ya, saya enggak tahu, kenapa dihilangkan. Tapi, yang pasti kata-kata itu memang ada. Saya enggak tahu kemudian kok dihilangkan. Kenapa dihilangkan, kok nanya ke saya?

Anda ikut mengoreksi?

Ndak, ndak, bukan ngoreksi. Misalnya begini, ada yang kebanyakan huruf 's', itu kita betulin. Hanya yang begituan saja.

Siapa saja yang membaca naskah Supersemar itu?

Semuanya, yaitu saya, Chaerul Saleh, Amirmachmud, Basuki Rachmat, dan Jusuf. Sejak naskah itu dibikin dan selesai diketik, Bung Karno menyuruh kita membacanya. Kita disuruh mana yang setuju dan mana yang tidak setuju.

Anda setuju?

Ya setuju, semua setuju. Gimana sih *you* ini? Gimana mau enggak setuju? *Wong* yang bikin Bung Karno, kita semua setuju. Lalu di situ Bung Karno tanda tangan.

Anda tahu siapa yang mengetik naskah Supersemar?

Ya, orang Istana.

Maksud Anda Istana Bogor?

Ya, ya.

Siapa namanya?

Ndak tahu. Di sana kan banyak staf. Bung Karno kan banyak stafnya. Dia tinggal menyuruh ketik ini.

Anda menyaksikan Bung Karno menandatangani Supersemar?

Ya, ya.

Ya, malam. Sekitar habis Isya lah.

Versi resmi pemerintah menyebutkan, Basuki Rahmat, Jusuf, dan Amirmachmud setelah mendapat Supersemar ke Jakarta. Tapi ada versi lain yang menyebutkan, mereka menginap semalam di Istana Bogor. Mana yang benar?

Mereka langsung pulang ke Jakarta, lapor kepada Pak Harto. Sudah, jangan banyak tanya-tanya. Saya kasihan sama Anda, enggak apa saya menjelaskan ini, saya enggak keberatan. Saya enggak mau kalau diwawancarai wartawan lain. Belum waktunya.

Apakah Supersemar itu pelimpahan kekuasaan dari Bung Karno kepada Soeharto?

Tidak begitu. Yang sebenarnya begini. Supersemar itu pelimpahan kekuasaan. Supersemar itu diserahkan ke Pak Harto.

Kalau sudah aman, diserahkan kembali ke Bung Karno. Jadi, Supersemar itu bukan penyerahan kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto. Sudah, jangan tanya lagi. Nanti Anda menanyakan saya tidur di mana?

Jadi, itu hanya berkaitan dengan pemulihan keamanan?

Ya, ya. Ini penting untuk meluruskan sejarah.

Waktu itu ada Bu Hartini?

Enggak ada di situ. Bu Hartini tempatnya lain. Sudah, sudah, jangan nanya lagi.

Apakah waktu itu Bu Hartini tinggal di paviliun?

Anu..., di sana banyak paviliunnya. Sudah, sudah, jangan nanya lagi. Oke?

Melihat Tingkah Amirmachmud..., Saya Ingin Merogoh Pistol

Wawancara dengan Ali Ebram, staf asisten I Intelijen Resimen Cakrabirawa. Dialah orang yang mengetik naskah Supersemar.

Selama lima tahun (1962-1967) Ali Ebram menjadi staf Asisten I Intelijen Resimen Cakrabirawa. Sebelumnya, pria kelahiran Solo yang oleh Bung Karno dipanggil “Kriminil” tersebut pernah menjadi prajurit Banteng Raiders di Semarang, yang saat itu Soeharto komandannya. Namun, karier militernya tamat ketika tanpa alasan yang jelas dia ditangkap tahun 1967, kemudian dipenjara selama 12 tahun tanpa proses peradilan. Setelah keluar dari penjara, Ali sering diancam teror agar tidak membuka mulut seputar peristiwa G-30-S dan SP 11 Maret. Beberapa bulan lalu, Ali datang ke rumah Soeharto untuk bersilaturahmi. “Dia kan bekas atasan saya. Waktu itu saya diberi uang untuk memperbaiki makam istri saya di Solo,” ungkap Ali. Sebelum bertemu Soeharto, pria yang kini berusia 71 tahun itu sempat diundang salah seorang pejabat tinggi Setneg untuk mencarikan naskah asli SP 11 Maret dengan imbalan Rp 1 miliar. Lebih dari 30 tahun, Ali memang berdiam diri soal SP 11 Maret.

Menurutnya, kini adalah saatnya untuk mengungkap peristiwa lahirnya SP 11 Maret. “Biarlah nanti saya ditembak atau... Pokoknya, saya lillahita’ala saja. Saya tidak punya maksud apa-apa,” katanya.

Berikut wawancara *DeTAK* dengan Ali Ebram, Senin 22 Februari dan Sabtu, 27 Februari 1999, di rumahnya.

Bisa diceritakan kegiatan Anda pada 11 Maret 1966?

Pagi itu dari Bogor, Bung Karno berangkat ke Jakarta. Hari Jumat itu ada rapat kabinet 100 menteri di Istana. Bung Karno berangkat dengan menggunakan helikopter. Sedangkan saya sendiri lewat jalan darat, begitu heli mengudara.

Malam hari sebelum sidang kabinet, banyak menteri bermalam di Istana Merdeka. Apa ada instruksi dari Presiden?

Tidak ada instruksi. Lho, itu kan mereka mendekat ke Istana karena di luar banyak demonstrasi. Jadi, biar tidak terlambat saja.

Apa betul ada tentara liar?

Iya, memang. Bung Karno mendadak meninggalkan istana karena ada pasukan liar yang akan menyerbu. Bung Karno memutuskan untuk terbang ke Istana Bogor. Ketika mesin heli mulai menderu, saya segera menyusul berangkat ke Bogor dengan menggunakan mobil. Sebenarnya (pasukan itu) bukan liar, hanya mereka tak pakai tanda-tanda pengenal. Tapi banyak yang tahu itu pasukan Kostrad.

Berarti Kemal Idris yang waktu itu Kaskostrad tahu?

Tahu bener. Makanya ketika ketemu, saya bilang, "Hai, Jenderal, Anda kok pakaiannya baru sekarang?" Dia marah-marah dengan saya. "Kamu *dobol*, nek ngomong nyakiti ati."

"Lho, pakaian baru kok sakit," saya bilang begitu. "Ya, ngerti aku maksudnya," katanya.

Pukul berapa Anda sampai di Istana Bogor?

Perjalanannya satu jam lebih.

Bung Karno sampai pukul berapa?

Kalau menurut radio, pukul setengah dua belas sudah sampai. Kalau naik helikopter, dari Jakarta ke Istana Bogor itu sekitar 10 menit.

Lantas Soebandrio naik apa?

Naik heli dengan Pak Chaerul Saleh. Bapak itu dengan heli yang besar, yang berada di lapangan yang sekarang Monas itu. Sedang Pak Chaerul berangkatnya dengan heli di dalam istana. Mereka berdua

(Soebandrio dan Chaerul —red) itu takut. Takut mau ditembak. *Dha mbingungi itu* (pada bingung). Tapi kalau Pak Chaerul almarhum, sih, tenang. Bandrio itu kan penakut.

Sesampai di Bogor; kejadian apa saja yang Anda lihat?

Begitu saya datang, tak lama pos jaga lapor.

“Pak, ini ada jenderal mau masuk.” Saya bilang, “Ya sudah, biarkan masuk.” Saya ini dianggap *taek-taek* kok oleh mereka, ketiga jenderal itu, Pak Basoeki Rachmat, Amir (Amirmachmud -red), dan M. Jusuf. Yang menemui pertama kan saya.

Saya tanya, “Mau apa, Pak?”

“Saya mau ketemu Sabur (Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa -red).” Lalu saya bilang, “Harap lapor Posko dulu!”

“Enggak perlu, saya mau ketemu Sabur.”

“Ya sudah, silakan ketemu, itu rumahnya di belakang.”

Yang jawab itu siapa?

Amirmachmud.

Apa tiga jenderal itu satu mobil?

Waduh, saya kok enggak ingat persis, ya. Kalau enggak salah dua mobil.

Tapi datangnya bersamaan?

Iya. Satu datang, lalu disusul di belakangnya. Selisih waktunya tak jauh. Ketiga jenderal itu ketemu Sabur. Oleh Sabur dilaporkan ke Bapak (Bung Karno -red), dan mereka dipersilakan masuk paviliun tempat Bu Hartini. Ketiga jenderal itu akhirnya diajak masuk. Saya kemudian dipanggil Sabur. “Kamu *ditimbali* Bapak (Kamu dipanggil Bapak),” kata Sabur. Saya ikut masuk tapi diam saja. Mereka itu ngomong antara lain, “Pak, berikan perintah pada Soeharto biar aman.” Amirmachmud yang ngotot agar Bapak membuat surat untuk Soeharto. Pembicaraan cukup lama.

Amir yang banyak bicara. “Sudah, Bapak bikin saja!” kata Amir sambil berdiri. Padahal Bung Karno hanya duduk dengan kepala bersandar pada kursi. Saya marah, “Hee, yang sopan, dong, Jenderal!” Eh, saya justru dimarahi Bapak. Saya dijawab dan diajak masuk ke belakang. Pipi saya ditempeleng. “*Kowe buntutku ojo melu-melu! Kowe meneng wae* (Kamu itu pembantuku, jangan ikut-ikutan! Kamu

diam saja!)!" Saya diam saja. Setelah dimarahi itu saya langsung keluar dari paviliun, dan kembali ke pos jaga. Saya masih marah. Bukan marah pada Bapak karena ditempeleng, tapi marah melihat Amirmachmud. Waktu melihat tingkah Amir itu, rasanya sudah ingin merogoh pistol saja. Kalau tidak ada Bapak, enggak tahu apa yang terjadi.

Jadi, yang paling aktif bicara Amirmachmud?

Ya. Juru bicaranya Amirmachmud. Yang pasif itu kan Mas Basoeki Rachmat. Kalau Pak Jusuf masih *ngegong-ngegongi*.

Apa bisa dikatakan ada pemaksaan?

Dikatakan paksa? Gimana, ya? Tapi tindakannya itu... apa ya..., ada penekanan begitulah. Contohnya, "Udah deh, Bapak itu masa tidak percaya sama Angkatan Darat?"

Bu Hartini ada di tempat itu?

Ada.

Jadi, dia tahu ada tiga jenderal?

Ya, tahu dong. Tapi Bu Hartini di belakang, di dapur, tidak ikut menemui ketiga jenderal itu.

Melihat sikap Amir, bagaimana reaksi Bung Karno?

Bapak itu enggak pernah mau marah-marahi orang. Justru kami-kami yang di sekitarnya yang sering kena marah. Saya atau Mangil itu ibaratnya tempolong. Tahu tempolong? Itu punya orang Jawa tempat untuk menampung ludah. Ibaratnya semua makian atau ungkapan marah pasti jatuh ke kami. Bapak itu kalau bicara kepada kami seringkali sengak dan nyakiti hati. Tapi kami ini sudah biasa. Sudah kebal. Karena, tahu, apa yang terlontar dari Bapak itu hanya ungkapan emosi sesaat. Bapak itu kalau marah bisa keras. Tapi kalau sudah balik kanan, berarti sudah selesai marahnya. Sesudah itu, biasanya kembali tertawa-tawa dan menyapa kami lagi.

Jadi, Anda tidak tahu pembicaraan selanjutnya?

Tidak. Lama mereka bicara sekitar dua jam. Tahu-tahu Sabur panggil saya. Dia minta saya membantu mengetik. Lha, saya kan tahu diri. Saya itu orang pasukan, masa disuruh buat *layang* (surat)? "Saya tidak bisa ngetik," saya bilang. Tapi Sabur memaksa. "Sudahlah, ikut saja. Bantu saya." Terus saya disuruh cari blangko surat yang berkepala kepresidenan. "Lho, di Jakarta, dong!" balas saya. Sabur jawab,

“Sudah, cari saja!”. Blangko itu yang kuasa kan Pak Jamin. Akhirnya dapat, itu sekitar pukul 15.00. Kami berdua masuk kamar pribadi Bapak. Sementara tiga jenderal menunggu di ruang tamu.

Siapa yang mengetik?

Saya, sedang Sabur duduk di samping saya. Bung Karno sendiri

Jadi, SP 11 Maret yang mengonsep Bung Karno sendiri?

Iya.

Anda masih ingat apa yang Anda ketik?

Wah... Pokok-pokoknya saja yang saya ingat. Ada disebut ajaran, koordinasi, terus laporan.

Ada berapa poin?

Ada empat poin. Soal keluarga, melindungi keluarga yang tidak ada. Yang keempat itu memberi laporan.

Berapa lama proses pengetikan itu?

Sekarang kalau orang enggak biasa ngetik terus diperintah ngetik, bisa dikira-kira berapa lama? Ngetiknya sambil *ndredeg* (gemetar). Sebelum mulai, saya bilang sama Bapak, "Pak, saya mohon *ampun kesesa* (Pak, saya mohon tidak tergesa-gesa)."

Bung Karno membawa konsep?

Enggak. Ngomong saja. Karena tidak pernah mengetik surat resmi kepresidenan, saya dan Sabur sempat kebingungan mau pakai spasi berapa. Kami bongkar-bongkar. mencari surat-surat lama untuk dijadikan contoh. Akhimya ketahuan. Saya dan Sabur sepakat memakai spasi dua. Bung Karno lalu mendikte. Sebelum tempat tanda tangan, kotanya diketik di Bogor. Terus di bawah tanda tangan ada kode pengetik. Di situ ada singkatan nama saya. Pakai inisial nama tua saya, YD (nama tua, Yosodiningrat). Setiap surat resmi presiden waktu itu, selalu di akhirnya ada inisial pengetik. Ngetiknya ya pelan-pelan, satu-satu. Belakangan saya diberi tahu teman-teman bahwa dalam SP 11 yang dikeluarkan resmi, tidak ada lagi inisial itu. Ya, biar.

Bagaimana ekspresi Bung Karno waktu mendikte?

Saya ndak berani melihat Bapak. Kalau beliau perkiraan kalimat yang diucapkan sudah diketik, baru tanya, "*Uwis* (sudah)?" Sudah, Pak. Tek-tek-tek... "*Uwis?*" Sudah, Pak. Tek-tek-tek...

Ada berapa lembar SP 11 Maret itu?

Dua halaman. Enggak muat kalau cuma satu halaman. Spasinya itu berapa? Bapak itu orangnya *correct*. Bung Karno itu orangnya *correct*. Jangan main-main sama beliau.

Waktu itu kan kertas pertamanya enggak cukup. Sudah mau habis. "Pak, kertasnya hampir habis," kata saya. "*Wis, dijembeng wae*

(Sudah, dimolorkan saja)!” kata Bung Karno. Lalu kami masukkan kertas kedua. Lama pengetikan satu jam lebih. Begitu selesai, saya serahkan Sabur. Kemudian dibawa Bapak ke ruang tamu. Itu dibaca Bapak lama sekali sambil merenung. Bapak kan masih ragu. Diam. Begitu Bapak bilang, “Pulpen!”, saya tinggal. Saya ke luar dari ruang itu menuju ke rumah komando. Tapi saya masih sempat dengar Amirmachmud bilang, “Iya, Bapak tanda tangan saja. Kenapa sulit-sulit!”

Kenapa Anda meninggalkan ruangan?

Maksud saya itu, supaya saya... (Tiba-tiba wajahnya memerah, air matanya menetes. Kata-katanya terputus-putus.)... di akhirat tidak tanggung jawab. Saya hanya mengamankan beliau saja. Saya di akhirat enggak bertanggung jawab. Saya saat itu nangis. Sekarang pun saya nangis. Saya dipesan benar oleh Bung Karno, “*Ojo melu-melu! Menengo wae terus* (Jangan ikut-ikutan, diam saja terus)! Ada saatnya...” Oalah, sekarang diam saja diancam terus, kok.

Anda mengatakan tak pernah mengetik. Apakah ada kesalahan-kesalahan?

Itulah anehnya. Enggak ada salah itu. Sepertinya ada yang membimbing. Biarpun pelan-pelan, ternyata semua berjalan lancar. Mungkin karena sangat pelan-pelan, ya? Cuma kadang ya misalnya ada huruf ‘s’ yang dobel.

Apakah dipasang karbon?

Ya, harus dikarbon, dong. Tapi lembar salinan atau arsipnya saya tidak tahu. Saya kan keluar lebih dulu. Mungkin yang lebih tahu Sabur. Atau Pak Jamin, sekretaris kabinet Presiden.

Bung Karno tanda tangan?

Saya ndak tahu. Kan saya keluar. Tapi beberapa waktu sebelum SP 11 itu, Bapak pernah bilang, “Heh, Bapak *wis gak disenengi* rakyat. Bapak *arep leren* (Bapak sudah tidak disenangi rakyat. Bapak mau berhenti.)” Mungkin itu firasatnya Bapak.

Setelah Anda keluar, apakah obrolan Bung Karno dengan tiga jenderal masih berlangsung?

Setelah itu Bapak mungkin langsung *sare* (tidur). Tapi enggak tahu ya, *wong* saya sudah enggak ngurus lagi.

MISTERI SUPERSEMAR

Dilengkapi Wawancara **Ali Ebram**
Si Pengetik SUPERSEMAR

"Anda sulit memahami perasaan kami, lah. Nanti kalau ngomong ini-itu dikira fitnah dan mau cari benarnya sendiri. Sebab, toh anda tahu monopoli kebenaran selama Orde Baru hanya ada di satu tangan." (**Megawati Taufiq Kiemas**, putri Bung Karno.)

"Ah, kata siapa? Dia sehat wal afiat. Saya kan datang ke rumahnya. Dia sehat." (**Mayjen TNI (Purn) Kemal Idris**, tentang tidak datangnya Soeharto memenuhi undangan Bung Karno)

"Orang sekarang suka membantah-bantah karena meragukan isinya. Apakah Bung Karno mau menyerahkan kekuasaan? Tidak. Dia mau berkuasa seumur hidup. Long life president of Indonesia...." (**Jenderal A.H. Nasution**)

Sampai hari ini kita masih mempersoalkan—dengan gumpalan emosi—apakah Supersemar merupakan sebuah kudeta atau tidak. Buku ini menghimpun kesaksian-kesaksian dari para pelaku sejarah, orang-orang yang hadir pada waktu Supersemar ditulis, dan juga orang yang mengetik surat perintah itu.

mediakita

Redaksi:

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 100 A-B Lt. 2
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12420
Telp: (021)-7290899, 7707129
Faks: (021)-7290899, 7701295
E-mail: info@mediakita.com
Situs web: www.mediakita.com

ISBN 979-794-011-X



9 789797 940119

Copyrighted material